

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(GCG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAHAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Meperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

Nama : IRVAN USMI SEMBIRING
NPM : 1605170134
Program Studi : AKUNTASI
Konsentrasi : AKUNTASI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Penitia Ujian Skripsi-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang telah berlangsung pada hari Senin, tanggal 14 April 2020, pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Sidang, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan memutuskan:

Nama : IRFAN USMI SEMBIRING
NPM : 1658170534
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PERKORINLAHAN KOTA MEDAN

Dinyatakan : (H) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

(IRFAN, S.E., M.M., Ph.D)

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(EDIZAR SIMAMBELA, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(MADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

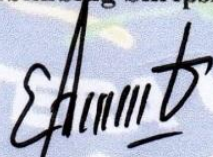
Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : IRVAN USMI SEMBIRING
N.P.M : 1605170134
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2020

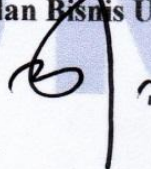
Pembimbing Skripsi



(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Irvan Usmi Sembiring

Program Studi Akuntansi

Irvanusmi716@gmail.com

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah adalah dengan cara menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan serta Untuk mengetahui penyebab penurunan rasio efektivitas, efisiensi & pertumbuhan pendapatan.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian dari Penerapan *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Kota Medan menunjukkan belum mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Terlihat dari menurunnya rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pendapatan. Yang merupakan dampak dari belum maksimalnya penerapan GCG pada prinsip kesetaraan dan kewajaran. Penyebab rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan adalah kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan sehingga Pemerintah Daerah Kota Medan masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat dan jumlah pendapatan yang diperoleh belum maksimal.

Kata Kunci : *good corporate governance*, Kinerja Keuangan Pemerintah.

ABSTRACT

ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Irvan Usmi Sembiring

Program Studi Akuntansi

Irvanusmi716@gmail.com

One effort to improve the performance of an government is by implementing Good Corporate Governance (GCG). The purpose of this study aims to determine the application of GCG in improving the financial performance of the Medan City Government and to find out the causes of the decrease in the ratio of effectiveness, efficiency & revenue growth.

This type of research is quantitative, data collection techniques conducted by interview, literature study and documentation. The data analysis technique used is quantitative descriptive.

The results of research from the Implementation of Good Corporate Governance in Medan City Government showed that it has not been able to improve the financial performance of Medan City Government. It can be seen from the decreasing effectiveness ratio, efficiency ratio and income growth ratio. Which is the impact of the not yet maximum application of GCG on the principle of equality and fairness. The cause of the effectiveness ratio, efficiency ratio, and revenue growth ratio has decreased is the lack of maximum revenue of the Medan City Government so that the Medan City Government still has to depend on the central government funds and the amount of revenue obtained is not yet maximal.

Keywords: good corporate governance, Government Financial Performance.

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr. Wb

Alhamdulillahrabbi'l'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan**” sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena nya saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Untuk yang terkhusus, Ayahanda Sidang Sembiring dan Ibunda Sainah Br Ginting tercinta. Dan terimakasih kepada Abang penulis Suprianto Sembiring beserta Kakak penulis Siti Zulaiha Br Sembiring S.E dan juga Adik Penulis Karmila Pitriani Br Sembiring yang selalu memberikan semangat, saran serta motivasi untuk penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si.

selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si. selaku Ketua prodi Akuntansi dan sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis. Ibu Zulia Hanum, SE. M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela, S.E. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi.
6. Kepada sahabat penulis Rozi, Cindy, Randunk, Vinna, Edo, Irma, Yuni, Zihan, ilak, puspa, sasa, tari serta teman-teman kelas C-Akuntansi pagi stambuk 2016 yang selalu semangat serta motivasi yang mendukung penulis.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap Skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Maret 2020
Penulis

IRVAN USMI SEMBIRING
1605170134

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	6
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teoritis	7
2.1.1. Good Corporate Governance	7
2.1.2. Kinerja Keuangan Daerah	9
2.1.3. Hubungan GCG dengan kinerja keuangan	16
2.2. Kerangka Berpikir Konseptual	17
BAB 3 METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian.....	20
3.2. Defenisi Operasional	20
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
3.4. Teknik Pengumpulan Data	24
3.5. Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN	25
4.1. Deskripsi Data.....	25
4.2. Analisis Data.....	29
BAB V PENUTUP	38
5.1. Kesimpulan	38
5.2. Saran	38
5.3. Keterbatasan Penelitian	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengukuran Kinerja Keuangan	3
Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	11
Tabel 2.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas	12
Tabel 2.3 Kriteria Pengukuran Efisiensi.....	13
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	19
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Good Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) demi tercapainya tujuan suatu entitas. *Good Corporate Governance*, dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam strategi suatu instansi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

Prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat menunjang tujuan suatu instansi yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Kemandirian, Pertanggungjawaban, Kewajaran. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan suatu instansi sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi suatu instansi untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggungjawab dan memungkinkan pengelolaan suatu instansi secara lebih amanah, sehingga dapat meningkatkan nilai instansi tersebut dan kepercayaan dari masyarakat.

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan suatu instansi dalam mengelola keuangan. Dasar yang dapat

digunakan pada pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkombinasikan analisis prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dan analisis rasio keuangan daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu instansi organisasi adalah dengan cara menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan dan pengolahan *corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menentukan pentingnya hak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu. Selain itu juga mewujudkan kewajiban suatu instansi untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan pemerintah secara akurat, tepat waktu dan transparan.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013:182).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan daerah,

diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio pinjaman daerah (DSCR) dan Rasio Pertumbuhan. (Halim, 2012:230).

Kondisi kinerja keuangan pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Pengukuran Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Medan

Tahun	Penerapan GCG	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Pertumbuhan Pendapatan
2014	Diterapkan	88,6%	92,1%	23,4%
2015	Diterapkan	82,9%	103,2%	3,5%
2016	Diterapkan	78,5%	105,0%	3,0%
2017	Diterapkan	79,8%	99,7%	2,3%
2018	Diterapkan	81,2%	99,1%	-3,5%

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Pemerintah Kota Medan sudah menerapkan GCG dalam 5 tahun terakhir. Namun setelah dilakukan pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan daerah masih terdapat rasio yang belum efektif dan efisien dalam pengelola pendapatan dan belanja sehingga pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan negatif.

Menurut Diah Kusuma, (2008 : 16) praktik GCG dapat meningkatkan kinerja suatu instansi, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan *steakholder* yang berdampak terhadap kinerjanya.

Optimalisasi penerapan *Good Corporate Governance* pada pemerintah Kota Medan terus dilakukan dalam mengelola keuangan untuk mencapai praktik terbaik. Dengan didukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* maka penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seharusnya telah dilakukan dengan baik di lingkungan pemerintah, karena dengan pedoman tersebut maka aturan-aturan pemerintah yang mengacu pada pedoman tersebut mampu mendukung dan memberi peningkatan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Medan sudah menerapkan GCG. Namun masih mengalami hal berikut:

1. Terjadinya penurunan Rasio Efektivitas pada tahun 2016-2017.
2. Terjadinya peningkatan Rasio Efisiensi pada tahun 2015-2016.
3. Terjadinya penurunan Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada tahun 2018.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penerapan *good corporate governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan terdapat 6 rasio keuangan daerah yang digunakan dalam pengukuran kinerjanya yaitu rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian modal, DSCR, dan pertumbuhan pendapatan. tetapi pada penelitian ini dibatasi hanya menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan?
2. Mengapa rasio efektivitas, efisiensi & pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui penyebab penurunan rasio efektivitas, efisiensi & pertumbuhan pendapatan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dalam penerapan GCG dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama periode yang ditentukan.

2. Bagi Pemerintah Kota Medan

Dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menerapkangood *corporate governance* (GCG) dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat di jadikan sebagai bahan refrensi dalam peneliti selanjutnya yang ada keterkaitan dengan objek penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Good Corporate Governance

a. Pengertian dan Konsep Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Istilah *Good Corporate Governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Codbury Committee di tahun 1993 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Codbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate Governance* dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandara (2008:24-25) sebagai ;

“Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktor, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.”

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholders*. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson,

Memandang bahwa manajemen suatu instansi sebagai “*agents*” bagi para pemangku kepentingan, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri.

Menurut Maya Sari (2015:10) “GCG adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.”

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 pada pasal 3, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai pemerintah.
2. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana suatu instansi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan suatu instansi terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan suatu instansi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Azhar Latif (2019:6). “Rasa tanggung jawab pihak manajemen terhadap para pemegang saham dapat dicapai dengan meningkatkan penerapan CG (Corporate Governance). Oleh sebab itu, skor penilaian penerapan CG perusahaan juga semakin baik.”

c. Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Manfaat *Good Corporate Governance* Menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (2001) yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pemerintah melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional suatu instansi, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terkait di Indonesia.

d. Faktor Keberhasilan Penerapan GCG

Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan GCG pada suatu instansi ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Komitmen dari organ pemerintah yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*).
5. Dukungan dari pihak *stakeholders*.
6. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh instansi itu sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.

2.1.2. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006:112), “Kinerja anggaran adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat, dan dampak.

“Menurut Mulyadi (2007), kinerja yang merupakan keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria tersebut berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.”

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim, 2012).

Menurut Putri & Nurlia (2013:24) “tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.”

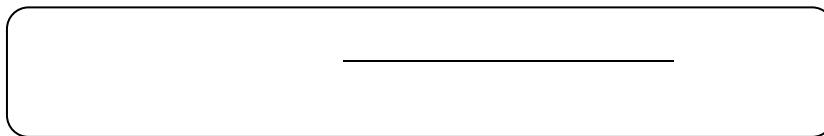
Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan

pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:



Tabel 2.1

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah.(daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomidaerah) Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.

b. Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2

Kriteria Pengukuran Efektivitas

Kriteria	Persentase
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

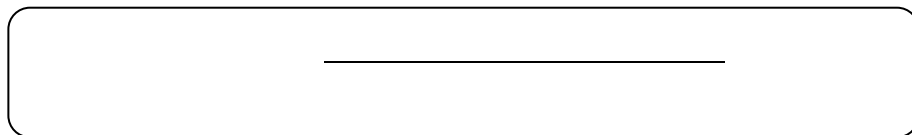
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013 hal. 112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3

Kriteria Pengukuran Efisien

Persentase	Kriteria
>30%	Tidak Efisien
21%-30%	Kurang Efisien
11%-20%	Cukup Efisien
5%-10%	Efisien
<5%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012 hal.236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung

semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu :

- 1) Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.
- 2) Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut Mahmudi (2010 hal.164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

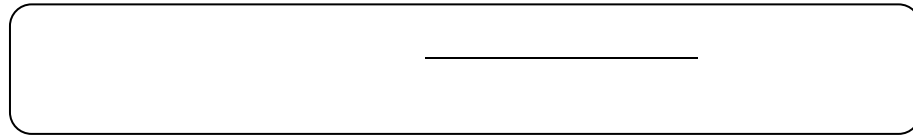
$$\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudi (2010 hal. 164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai

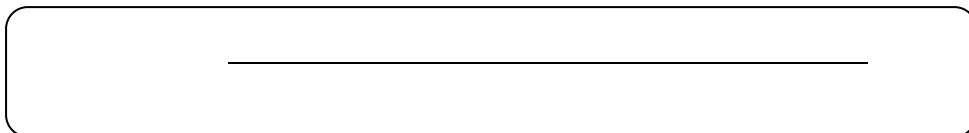
berikut:



Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

e. Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Rasio DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya, pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Rasio DSCR dikatakan baik apabila rasio tercapai lebih dari 2,5 atau 250%.



f. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010 hal.138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan.

pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun} - \text{Pendapatan Tahun}}{\text{Pendapatan Tahun}}$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim (2008 hal. 241) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

2.1.3. Hubungan *Good Corporate Governance* dengan Kinerja Keuangan

Menurut Baidaie (2013 : 12), kinerja suatu instansi tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan tetapi juga ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. pada prinsipnya *Good Corporate Governance* menyangkut mengenai kepentingan para pemangku kepentingan, peranan semua pihak yang berkepentingan atau *stakeholders* dalam *Corporate Governance*, dengan demikian, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mengatur hal-hal yang terkait dengan:

- a. Transparansi, menurut Tunggal dan Amir (2002:7) yaitu pengungkapan informasi kinerja perusahaan, baik ketepatan waktu maupun akurasi (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, standardization, efficiency time and cost*). Inti dari prinsip ini adalah meningkatkan keterbukaan dari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat sertabener.
- b. Kemandirian, Menurut Iman dan Amin (2002 :8)prinsip ini mengatur tentang bagaimana perusahaan harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder*, artinya perusahaan harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain dan lebih meyakini serta lebih percaya pada dirinya sendiri dan lebih mengetahui keputusan yang terbaik yang harus diambil perusahaan, sehingga kinerja akan lebih terpercaya, akurat dan menghindari proses penilaian kelayakan yang tidak *fair* dan juga akan menghindari masalah *financial*.
- c. Akuntabilitas, Menurut Iman dan Amin (2002:7), akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *board of commissioners, board of directors, shareholders*, dan auditor (pertanggungjawaban, wewenang, *traceable, reasonable*).
- d. Pertanggungjawaban, menurut Iman dan Amin (2002:8), pertanggungjawaban perusahaan artinya perusahaan sebagian dari masyarakat, bertanggung jawab kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan berada. Prinsip ini mengatur pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders* yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh *stakeholders* (keseimbangan eksternal) untuk mewujudkan perusahaan sebagai *good corporate citizen*.
- e. Kewajaran, Menurut Iman dan Amin (2002: 6), dalam hal ini adanya suatu perlindungan kepentingan *minority stakeholders* dari penipuan,

kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam. Kewajaran adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria proporsi seharusnya. Prinsip ini mengatur bagaimana menetapkan peran dan tanggung jawab komisaris dan manajemen dalam mengelola masing-masing pusat pertanggungjawabannya.

- f. *Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dalam urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utamanya adalah dengan mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

2.2. Kerangka Berpikir Konseptual

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar menciptakan keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. Penerapan GCG yang baik berdampak pada Kinerja Keuangan. Dengan adanya penerapan GCG diharapkan mampu untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah. Penerapan dan pengolahan *corporate governance* juga mewujudkan kewajiban pemerintah untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan pemerintah secara akurat, tepat waktu dan transparan. Tujuan GCG pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Secara teoritis, pelaksanaan GCG dapat meningkatkan nilai suatu instansi, dengan meningkatnya kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan Investor.

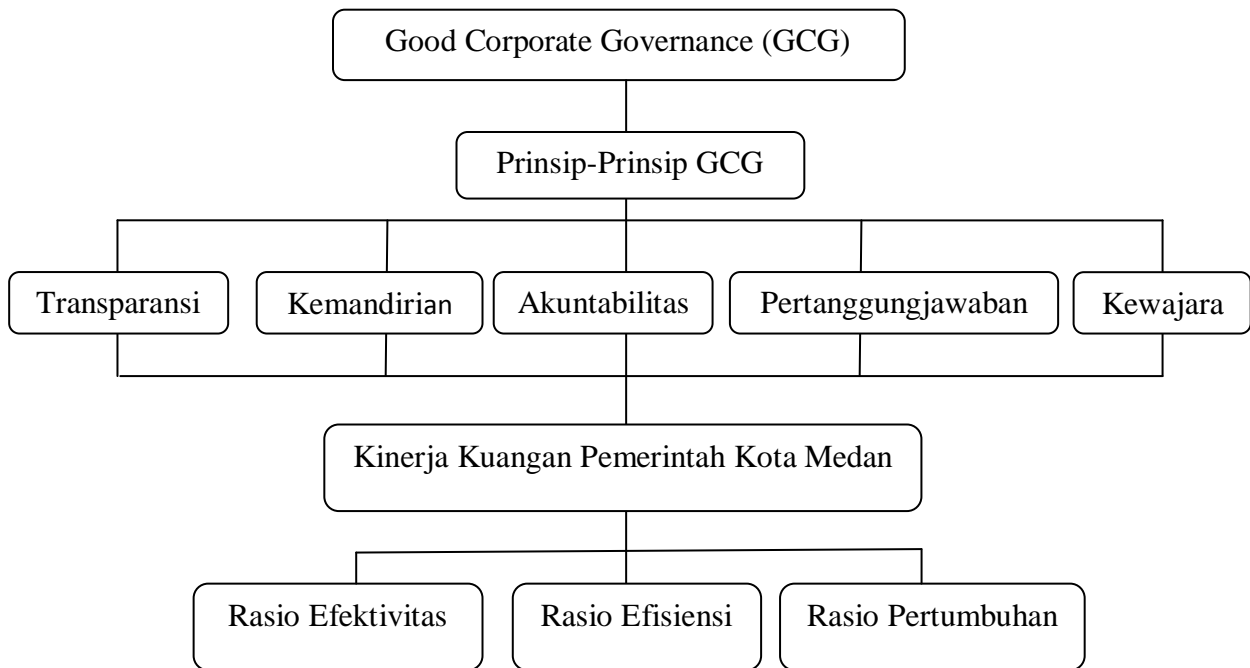
Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah

dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordian, dkk, 2007: 39).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan Daerah, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio pinjaman daerah (DSCR) dan Rasio Pertumbuhan.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang merupakan data berbentuk angka-angka bukan berbentuk kalimat. Ataupun penelitian yang mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan variabel yang ada di dalam penelitian.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan. Adapun definisi dari variabel penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu instansi dengan tujuan agar menciptakan kesinambungan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Pengukuran untuk tingkat *Good Corporate Governance* dilakukan dengan analisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilihat dari :

a. Transparansi

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

c. *Responsibility*

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

d. *Independency*

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. *Fairness*

perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi –potensi kinerja yang akan berlanjut. Untuk menganalisis kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah yaitu:

a. Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Pendapatan Realisasi}}{\text{Pendapatan Target}}$$

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan}}{\text{Pendapatan Realisasi}}$$

c. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan yaitu sebagai berikut :

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun} - \text{Pendapatan Tahun } t-1}{\text{Pendapatan Tahun } t-1}$$

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi terhadap sumber penelitian, yaitu yang dilakukan dengan memperoleh laporan realisasi anggaran 2014-2018 instansi tersebut.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanyajawab secara langsung dengan pihak yang berwenang di Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah di bagian Akuntansi Pemerintahan Kota Medan untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menghasilkan data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Menghitung dan menganalisis kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan daerah.
2. Menganalisis penerapan GCG pada Pemerintahan Kota Medan.
3. Menganalisis GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan Kota Medan.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Dalam menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah daerah menggunakan teknik wawancara dan pengukuran rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian, aktivitas, efisiensi, keserasian modal, DSCR, dan pertumbuhan pendapatan tetapi dibatasi hanya pada rasio aktivitas, efisiensi, pertumbuhan pendapatan dan prinsip-prinsip GCG. penulis menggunakan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Medan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018.

1. Hasil Wawancara

Berikut hasil wawancara tentang penerapan GCG dan pengukuran rasio keuangan Pemerintah Kota Medan.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sejak kapan BPKAD Kota Medan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) ?	Tepatnya pada tanggal 30 Desember 2012.
2.	Apa yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan prinsip Good Corporate Governance?	Pedoman Pemerintah Kota Medan dalam menerpkan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 pada pasal 3, Itulah pedoman yang diterapkan Pemerintah Kota Medan dari awal Good Corporate Governance(GCG) di terapkan.

3.	Bagaimana Bentuk Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Pemerintah Kota Medan? seperti prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>).	Ya. keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai pemerintah.
4.	Bagaimana Bentuk Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Pemerintah Kota Medan? Seperti prinsip akuntabilitas (<i>accountability</i>).	Ya. Akuntabilitas itu kan berbicara tentang angka, segala sesuatu yang bisa dipertanggung jawabkan, jadi akuntabel tata dasarnya iya kan, jadi semuanya bisa di pertanggung jawabkan. Misalnya anggaran-anggaran yang ada dipemerintahan ini itulah salah satunya.
5.	Bagaimana Bentuk Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Pemerintah Kota Medan? Seperti prinsip Pertanggungjawaban.	Ya. kesesuaian di dalam pengelolaan suatu instansi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
6.	Bagaimana Bentuk Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Pemerintah Kota Medan? Seperti prinsip Kemandirian (<i>independency</i>).	Ya. keadaan di mana suatu instansi di kelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
7.	Bagaimana Bentuk Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Pemerintah Kota Medan? Seperti prinsip Kewajaran (<i>fairness</i>).	Ya. Nah kewajaran disini menuntut adanya perlakuan yang adil kepada semua pihak baik pegawai. Seperti jika ada pegawai yang melakukan pelanggaran tidak peduli jabatannya atau ikatan pada keluarganya dari pejabat terkait, selama dia melakukan pelanggaran maka harus diberi sanksi yang tegas. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat pada beberapa pegawai yang memanfaatkan situasi dimana dia memiliki saudara yang jabatannya lebih berpengaruh di instansi tersebut, maka dari itu masih belum efisiennya penerapan prinsip ini.
8.	Bagaimana cara mengukur kinerja keuangan BPKAD Kota Medan?	Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah.

9.	Apa saja rasio keuangan daerah yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan BPKAD Kota Medan?	Menggunakan rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian modal, DSCR, dan pertumbuhan pendapatan.
----	---	--

2. Pengukuran rasio keuangan daerah

a. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan. Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan reasilasi anggaran dibagi anggaran pendapatan dikali 100 %.

Tabel 4.1

Efektivitas Pendapatan Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi	Anggaran	Efektivitas
2014	Rp. 4.042.115.828.231	Rp. 4.560.412.529.543	88,6%
2015	Rp. 4.182.763.354.874	Rp. 5.046.111.839.162	82,8%
2016	Rp. 4.308.066.881.066	Rp. 5.490.162.683.364	78,5%
2017	Rp. 4.409.065.482.200	Rp. 5.523.623.117.219	79,8%
2018	Rp. 4.253.618.758.532	Rp. 5.239.408.001.116	81,2%

Sumber : Data diolah (2020)

b. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin. Kinerja pemerintah daerah Kota Medan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Kota Medan. Dalam penelitian ini pengukuran efisien dilakukan dengan perhitungan realisasi belanja daerah dibagi realisasi pendapatan daerah dikali 100 %.

Tabel 4.2

Rasio Efisiensi Penerimaan Pemerintah Kota Medan

Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio efisiensi
2014	Rp. 3.723.643.299.085	Rp. 4.042.115.828.231	92,1%
2015	Rp. 4.316.645.669.627	Rp. 4.183.906.157.155	103,2%
2016	Rp. 4.525.231.330.995	Rp. 4.308.066.881.066	105,0%
2017	Rp. 4.395.825.169.224	Rp. 4.409.065.482.200	99,7%
2018	Rp. 4.215.003.353.126	Rp. 4.253.618.758.532	99,1%

Sumber : Data diolah (2020)

a) Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya

diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan pendapatan adalah pendapatan tahun sebelumnya dikurang pendapatan tahun saat ini dibagi pendapatan tahun saat ini .

Tabel 4.3

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota Medan

Tahun	Pendapatan Awal	Pendapatan Akhir	Pertumbuhan Pendapatan
2014	Rp.3.276.344.285.159	Rp. 4.042.115.828.231	23,4%
2015	Rp.4.042.115.828.231	Rp.4.183.906.157.155	3,5%
2016	Rp.4.183.906.157.155	Rp.4.308.066.881.066	3,0%
2017	Rp.4.308.066.881.066	Rp.4.409.068.482.200	2,3%
2018	Rp.4.409.068.482.200	Rp.4.253.618.758.532	-3,5%

Sumber : Data diolah (2020)

4.2 Analisis Data

1. Penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Medan maka hasil wawancara yang dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Transparansi (*Transparency*)

Dalam hal ini Pemerintah Kota Medan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai serta jelas dan akurat kepada pihak yang berkepentingan yang dapat dilihat dalam bentuk laporan keuangan. Keterbukaan informasi instansi ini ada di situs www.pemkomedan.go.id. BPKAD menyediakan informasi kepada publik untuk setiap aksi korporasi yang telah dilaksanakan selambat-lambatnya dua hari kerja. Informasi yang disajikan BPKAD juga meliputi Agenda harian kerja, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Realisasi Anggaran.

Menurut Tunggal dan Amir (2002:7) yaitu pengungkapan informasi kinerja suatu instansi, baik ketepatan waktu maupun akurasi (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, standardization, efficiency time and cost*). Inti prinsip ini meningkatkan keterbukaan dari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat serta benar.

Dalam prinsip ini suatu instansi dituntut mampu menyediakan informasi yang penting atau materiil dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, *comparable* dan mudah diakses serta dipahami oleh *stakeholders* karena keyakinan dan kepercayaan *stakeholders* terhadap suatu instansi tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu instansi tersebut hendaknya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam pengungkapan laporan keuangan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pemerintah Kota Medan menerapkan berbagai aturan perundangan yang berlaku dan berbagai kebijakan dasar pengelolaan pemerintahan sesuai ketentuan regulator di suatu

instansi yaitu, membentuk Komite Audit yang Independen dan Kompeten sebagai bagian dari penegakan aturan internal dan berjalannya kegiatan operasional sesuai kaidah korporasi yang baik, Kepala bagian membentuk Komite Audit dengan anggota-anggota yang berkompeten dibidangnya, berstatus independen dan mampu bertindak independen. Dan Pemerintah Kota Medan juga menerapkan sistem penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, tetapi instansi ini juga memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan.

Menurut Iman dan Amin (2002:7), akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *board of commissioners, board of directors, shareholders*, dan auditor (pertanggungjawaban, wewenang, *traceable, reasonable*).

Dalam prinsip ini Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Usaha yang dilakukan instansi ini untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ pemerintah tersebut, serta memastikan setiap organ pemerintah mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika dan pedoman perilaku pemerintahan.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Dalam prinsip ini Pemerintah Kota Medan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya instansi

pemerintah seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat sangat diperlukan.

Menurut Iman dan Amin (2002:8), pertanggungjawaban perusahaan artinya perusahaan sebagian dari masyarakat, bertanggung jawab kepada *stakeholders* dan lingkungan di mana perusahaan berada. Prinsip ini mengatur pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders* yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh *stakeholders* (keseimbangan eksternal) untuk mewujudkan perusahaan sebagai *good corporate citizen*.

Beberapa kebijakan dan praktek operasional yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dikelola dan upaya peningkatan kualitas penerapan asas ini seperti, setiap instansi pemerintah dituntut menunjukkan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas tersebut dinilai untuk kemudian dijadikan dasar bagi penetapan jenjang karir dan besaran remunerasi yang akan diterima.

d. Kemandirian (*Independency*)

Penyusunan dan penerapan *code of conduct* termasuk pengaturan seluruh transaksi maupun rencana realisasi anggaran yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Larangan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan hingga derajat tertentu antara para petinggi pemerintah dengan karyawan biasa. Dalam hal ini pemerintah dikelola secara independent, dimana suatu instansi harus menghindari terjadinya dominasi pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh

kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

Menurut Iman dan Amin (2002 :8) prinsip ini mengatur tentang bagaimana instansi harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder*, artinya perusahaan harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain dan lebih meyakini serta lebih percaya pada dirinya sendiri dan lebih mengetahui keputusan yang terbaik yang harus diambil instansi tersebut, sehingga kinerja akan lebih terpercaya, akurat dan menghindari proses penilaian kelayakan yang tidak *fair* dan juga akan menghindari masalah *financial*.

Pemerintah Kota Medan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun. Karena setiap instansi pemerintah memiliki aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan yang melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Memperlakukan seluruh *stakeholder* secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh instansi juga membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan sumbang saran bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan instansi tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat pada beberapa pegawai yang memanfaatkan situasi dimana dia memiliki saudara yang jabatannya lebih berpengaruh di instansi tersebut, maka dari itu masih belum efisiennya penerapan prinsip ini. Dan hal ini juga diterapkan dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian dan penetapan jenjang karir para karyawan.

Menurut Iman dan Amin (2002: 6), dalam hal ini adanya suatu perlindungan kepentingan *minority stakeholders* dari penipuan, kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam. Kewajaran adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria proporsi seharusnya. Prinsip ini mengatur bagaimana menetapkan peran dan tanggung jawab komisaris dan manajemen dalam mengelola masing-masing pusat pertanggungjawabannya.

Kesetaraan dan kewajaran juga diterapkan dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian dan penetapan jenjang karir para karyawan. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat pada beberapa pegawai yang memanfaatkan situasi dimana dia memiliki saudara yang jabatannya lebih berpengaruh di instansi tersebut, maka dari itu masih belum efisiennya penerapan prinsip ini.

Berdasarkan hasil wawancara dari penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan dapat dikatakan penerapan GCG yang dilakukan pada pemerintah Kota Medan pada beberapa prinsip sudah baik tetapi masih terdapat penerapan di prinsip kesetaraan dan kewajaran yang belum efektif penerapannya maka dari itu penerapan GCG pada pemerintah Kota Medan tidak berjalan dengan maksimal Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan Menurut Diah Kusuma, (2008 : 16) praktik GCG dapat meningkatkan kinerja suatu instansi, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* yang berdampak terhadap kinerjanya. Sehingga penerapan GCG yang belum maksimal maka kinerja keuangan juga belum efisien.

2. Penyebab rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan.

Berikut ini adalah hasil perhitungan kinerja keuangan pemerintah Kota Medan menggunakan analisis rasio keuangan daerah:

a. Rasio Efektivitas

Dapat dilihat dari tabel 4.1 rasio efektivitas atas pendapatan daerah untuk tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2016 dan tahun 2017 rasio efektivitas mengalami penurunan. Untuk tahun 2014 dan 2015 rasio efektivitas sebesar 88,6% dan 82,8% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 78,5% dan 79,8% yang juga termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2018 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 81,2%, yang juga termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa

bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Medan.

b. Rasio Efisiensi

Dapat dilihat dari tabel 4.2 untuk belanja Pemerintah Daerah Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya ditahun 2014 belanja daerah mengalami penurunan, dan untuk tingkat realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan. Untuk tahun 2014 rasio efisiensi sebesar 92,1% yang termasuk dalam kategori efisien karena berada dibawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 103,2% dan 105,0 % yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%. Sedangkan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 99,7% dan 99,1%, yang termasuk dalam kategori efisien karena berada dibawah 100%.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Medan. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2014 mengalami penurunan, sedangkan ditahun 2015-2018 mengalami peningkatan, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Medan. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah Kota Medan mengalami penurunan karena besarnya belanja yang

dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Medan, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.

c. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat untuk tahun 2014 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2018 tingkat pendapatan daerah mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2014 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 23,4%, tetapi untuk tahun 2015 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan 3,5% sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 tingkat pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 3,0% dan 2,3% sedangkan untuk tahun 2018 tingkat pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan drastis yaitu -3,5%. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

Hal ini dapat dikatakan bahwa pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah Kota Medan untuk tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Medan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis GCG dalam meningkatkan Rasio keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Kota Medan menunjukkan belum mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Terlihat dari menurunnya rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pendapatan. Yang merupakan dampak dari belum maksimalnya penerapan GCG pada prinsip kesetaraan dan kewajaran.
2. Penyebab rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan adalah kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan sehingga Pemerintah Daerah Kota Medan masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat dan jumlah pendapatan yang diperoleh belum maksimal.

5.2 Saran

Setelah memperhatikan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan rasio keuangan daerah, penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kota Medan, agar selalu melakukan penilaian dan evaluasi kinerja.

2. Pemerintah Kota Medan sebaiknya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi instansi yang memiliki kinerja lebih baik.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah indikator-indikator pernyataan masing-masing variabel yang mampu mengarah pada permasalahan yang diteliti sehingga hasilnya menjadi lebih baik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah di usahakan dan di laksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah hanya terdiri dari dua variabel yaitu prinsip GCG dan rasio keuangan daerah , sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan wawancara yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sumber tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim dkk, (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Chatime, B. (2013). *Corporate Governance dan Kebijakan Audit*. Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- FCGI. (2001). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Edisi ke-2, Jilid II, FCGI.
- Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG). *Pedoman Umum Good Corporate (GCG)*. Jakarta.
- Latief, A. (2019). *Corporate Governance dan dampaknya terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan*. 20, 111–112.
- Lubis, P. K. D., & Hafni, N. (2013). *Analisis rasio kinerja keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten labuhan batu tahun anggaran.1*, 26–28.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*: Edisi Revisi (Jakarta). Andi.
- Mawardi, D. K. (2008). *Pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan di indonesia. Skripsi sarjana (tidak dipublikasikan)*.
- Mulyadi. (2007). *Akuntansi Biaya, Edisi ke 3*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Nordiawan, D. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011. *Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) pada BUMN*.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Sari, M. (2015). *Analisis good corporate governance dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. JasaMarga (Persero) Tbk*. 5, 10–11.

Surya, I., & Yustiadavana, I. (2008). *Penerapan corporate governance (mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha)*. Kencana.

Tunggal, A. W., & Tunggal, I. S. (2002). *Memahami konsep corporate governance*. Havarindo.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1246/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/11/12/2019

Kepada Yth.

Medan, 11/12/2019

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Irvan Usmi Sembiring
NPM : 1605171034
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. pengaruh DAK sangat signifikan terhadap alokasi dana APBD kota medan
2. Buruknya tata kelola pemerintahan menyebabkan berbagai kegagalan korporasi yang berdampak pada memburuknya perekonomian daerah
3. Belum di terapkannya prinsip good corporate governance menyebabkan timbulnya resiko dan kecurangan dalam pelaporan keuangan
- Rencana Judul : 1. Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Di Pemerintahan Kota Medan
2. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan
3. Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan
- Objek/Lokasi Penelitian : BPKAD KOTA MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Pemohon

(Irvan Usmi Sembiring)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1246/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/11/12/2019

Nama Mahasiswa : Irvan Usmi Sembiring

NPM : 1605171034

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Tanggal Pengajuan Judul : 11/12/2019

Nama Dosen pembimbing*) :

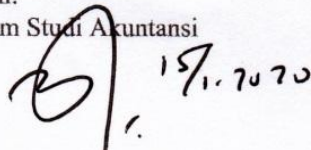
Elizar Sinambela, SE, M.Si AS 16/12-2019

Judul Disetujui**)

Dampak penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Aca 16/12-19

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi



(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 16 Desember 2019

Dosen Pembimbing



(Elizar Sinambela, SE, M.Si)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 187/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Irvan Usmi Sembiring
N P M : 1605170134
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela.,SE.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **16 Januari 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Rab. Awwal 1441 H
16 Januari 2020 M



Dekan **Y**

H. Jandri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20.... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : IRUAN USMI SEMBIRING

NPM : 1605170134

Tempat.Tgl. Lahir : LAU GAPUT
05 10 1996

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : JL AMPERA IX NO 5

Tempat Penelitian : BALITBANG (BADAN PEN
ELITIAN DAN PENGEMBA
NGAN) KOTA MEDAN

Alamat Penelitian : JL KPT MAULANA LUBIS
NO 02 MEDAN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

17.2020
(Fitriani Saragih, SE, Msi)

Wassalam
Pemohon

(Irvan Usmi Sembiring)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 190/IL.3-AU/UMSU-05/F/2020
 Lampiran :
 Perihal : **IZIN RISET PENDAHULUAN**

Medan 20 Jum. Awwal 1441 H
 16 Januari 2020 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
 Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 02 Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang study **Strata Satu (S-1)**

Adapun mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : **Irvan Usmi Sembiring**
 Npm : **1605170134**
 Program Studi : **Akuntansi**
 Semester : **VII (Tujuh)**
 Judul : **Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan**

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan 



H. Hanuri, SE., MM., M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Pertiinggal



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ 161 /Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 190/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 Tanggal: 16 Januari 2020 Hal: Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Irvan Usmi Sembiring.**
NPM : 1605170134.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
Judul : Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan.
Lamanya : 1(Satu)Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .
Pada Tanggal : 22 Januari 2020

An. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 939/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 30 Jum. Akhir 1441 H
24 Februari 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 02 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Irvan Usmi Sembiring
N P M : 1605170134
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan



H. Januri, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, Kode Pos - 20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228, Website: pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/629/BPKAD - III / 2 / 2020

Kepada badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Medan, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama : **IRVAN USMI SEMBIRING**
Npm : **1605170134**
Universitas : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**
Jurusan/Prog.Studi : **AKUNTANSI/ S-1**

Telah selesai melaksanakan penelitian (Research) di **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan** pada **Bidang Perbendaharaan** dari tanggal 22 Januari 2020 s.d tanggal 28 Februari 2020 guna penulisan skripsi dengan judul: **"ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN"** .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 3 Maret 2020



a.n. Kepala BPKAD Kota Medan
Kabid. Perbendaharaan,

Sanusi Harahap, S.sos.

Pembina

NIP.19620512 198503 1 009



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 10 Februari 2020* menerangkan bahwa:

Nama : Irvan Usmi Sembiring
NPM : 1605170134
Tempat / Tgl.Lahir : Lau Garut, 05 Oktober 1996
Alamat Rumah : Jln. Ampera IX No. 5
Judul Proposal : Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Elizar Sinambela, SE, M.Si. 17/2-2020*

Medan, 10 Februari 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE, M.Si

Pembanding

Hj. Hafsah, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
Dekan

H. Januri, SE, MM. M.Si



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 10 Februari 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Irvan Usmi Sembiring*
NPM. : 1605170134
Tempat / Tgl.Lahir : Lau Garut, 05 Oktober 1996
Alamat Rumah : Jln. Ampera IX No. 5
Judul Proposal : Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
Bab I	<i>- identifikasi masalah - data</i> <i>- batasan masalah</i>
Bab II	<i>- kerangka berpikir</i>
Bab III	<i>- Regensi operasional</i>
Lainnya	<i>ditambah penulisan - Daftar pustaka</i>
Kesimpulan	<u>Perbaikan Minor</u> Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 10 Februari 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulfah Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Elizar Sirambela, SE, M.Si

Pembanding

Hj. Hafsa, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Irvan Usmi Sembiring Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170134 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE, M.Si Judul Penelitian : Analisis Penarapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Pastikan Xorasi judul - Perbaiki latar belakang - Pengklas masalah penelitian - Perbaiki Rumus & tgl.	27/1/20	EA.
Bab 2	- Teori pedung variabel - Keryla Berpik konsep	28/1/20	EA.
Bab 3	- Definis penelitian - Definis operasional variabel - Teknik analisis data.	30/1/20	EA.
Daftar Pustaka	- lengkapi serti proposal	31/1/20	EA.
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Laporan	34/1/20	EA.
Persetujuan Seminar Proposal	Acc & seminar	4/2/20	EA.

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Medan,2020

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Irvan Usmi Sembiring Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170134 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE, M.Si Judul Penelitian : Analisis Penarapan
Good Corporate Governance (GCG)
Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Medan.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki kata/ kalimat pd Lem - Jelaskan data dibawah tabel - Bahasan Masalah - Rumusan Masalah - Teori pendukung - Tujuan & Manfaat	20/2-20	EA
Bab 2	- Perhatikan penulisan kutipan - kerangka Berpikir Empiric	24/2-20	EA
Bab 3	- Perbaiki jenis penelitian - Defenisi operasional	25/2-20	EA
Bab 4	- Perjelas data penelitian - Pembahasan - Hasil wawancara - Pembahasan teori GCG - Data silyhup - Bahasa silih Rumusan	9/3-20	EA
Bab 5	- Kesimpulan & saran menyamb Rumusan masalah	6/3-20	EA
Daftar Pustaka	- cekmkn dgn kutipan & terpin	7/3-20	EA
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selusi Bimby ACC di ujika pd Sidy Meja Hijau	9/3-20	EA

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Medan,2020

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si



**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT KELULUSAN

Nomor : 3347 /IL.3-AU/UMSU-BIM/F/ 2019

Diberikan Kepada:

Nama : IRVAN USMI SEMBIRING

NPM : 1605170134

Sebagai peserta ujian komprehensif mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diadakan pada hari/tanggal:

Rabu, 04 Rabi'ul Awwal 1441H / 01 November 2019M

Dinyatakan

LULUS

Medan, 04 Rabi'ul Awwal 1441 H
01 November 2019 M

**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Ketua

Nur Rahmah Amini, M.Ag

Sekretaris

Rasta Kurniawati Br Pinem, M.A





SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor : 1454/II.3-AU/UMSU/PUSKIIBI-UKK/F/2019

Dengan ini menyatakan bahwa,

IRVAN USMI SEMBRING

NPM : 1605170134

Telah memenuhi persyaratan untuk kompetensi pada

UJI KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN

Medan, 28 Nopember 2019



Ketua PUSKIIBI UMSU

Hj. DEWI ANDRIANY, S.E., M.M





Certificate of Achievement

Nomor : 0098/II.3-AU/ST/UMSU-PBB/C/2020

This is to certify that
Irvan Usmi Sembiring

Date of birth May 10, 1996 Place Lau Garut

Achieved the following scores on **TOEFL**
 Test of English as a Foreign Language

Listening Comprehension : 33
 Structure and Written Expression : 29
 Reading Comprehension : 29



Head of Language Center

Rini Ekayati
 Rini Ekayati, SS, MA

Language Center
 Head Office
 Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Gugur Darat II,
 Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
 Telp. 081361353617



Issued in Medan on January 2020
 This certificate is effective for 1 (one) year after issued.

TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Services (ETS). The content of this test is not approved or endorsed by ETS.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi & Bisnis**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor : 01/II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Dengan ini menyatakan bahwa,

IRVAN USMI SEMBIRING

NPM : 1605170134

Dinyatakan lulus pada

UJI KOMPETENSI AKUNTANSI

Medan, 3 Maret 2020



Ketua Program Studi Akuntansi

Firdani Saragih, S.E., M.Si

JL. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp : (061) 6622400 Fax : (061) 6623474, 6631003

Website : <http://www.feb.umsu.ac.id>